



KESIAPAN KOMANDO GABUNGAN WILAYAH PERTAHANAN I DALAM MENGANTISIPASI ANCAMAN UDARA PADA KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

READINESS OF THE JOINT COMMANDO DEFENSE AREA I IN OVERCOMING THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT AIR THREAT

Andi Wijanarko, Tatar Bonar Silitonga, Sovian Aritonang

Prodi Strategi Dan Kampanye Militer
Fakultas Strategi Pertahanan
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

andiwijanarko1996@gmail.com

Abstract- *The South China Sea conflict has been going on for a long time. Its early history is the penetration by China of its unilateral claim to ownership of the majority of the South China Sea. In recent years, the escalation of conflict in the South China Sea has increased. This of course affects the territory of Indonesia which is located or directly adjacent to the South China Sea. The areas closest to the South China Sea are the North Natuna Sea and the Natuna Islands. The purpose of this research is to analyze the threat from the South China Sea conflict and the readiness of Regional Military Command I to anticipate it. This research method is a qualitative descriptive design. The theory is used for national defense, readiness, roles, threats, air power and the concept of air operations. The results of this study are that potential threats that occur both in the form of military and non-military threats to the air sovereignty of the Republic of Indonesia are quite large affected by the South China Sea conflict. The readiness of Kogabwilhan I in anticipating air threats in the South China Sea includes operational and combat readiness which is supported by readiness for organizational development, training and shifting of forces or defense equipment. The conclusion is that there are potential threats and the readiness of Kogabwilhan I requires the support of infrastructure and defense equipment.*

Keywords: *Threat Anticipation, South China Sea Conflict, Preparedness, Air Defense*

Abstrak - Konflik Laut China Selatan telah berlangsung sejak lama. Sejarah awalnya adalah penetrasi yang dilakukan oleh Tiongkok atas klaim sepihak mereka terhadap kepemilikan mayoritas wilayah Laut China Selatan. Beberapa tahun terakhir ini eskalasi konflik di Laut China Selatan mengalami peningkatan. Hal ini tentunya berpengaruh pada wilayah Indonesia yang berada atau berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Wilayah yang paling dekat dengan Kawasan Laut China Selatan adalah Kawasan Laut Natuna Utara dan Kepulauan Natuna. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ancaman dari konflik Laut



China Selatan dan kesiapan Kogabwilhan I untuk mengantisipasinya. Metode penelitian ini adalah kualitatif desain deskriptif. Teori yang digunakan pertahanan negara, kesiapan, peranan, ancaman, kekuatan udara dan konsep operasi udara. Hasil dari penelitian ini adalah Potensi ancaman yang terjadi baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap wilayah kedaulatan udara Negara Republik Indonesia cukup besar terdampak dari konflik Laut China Selatan. Kesiapan Kogabwilhan I dalam mengantisipasi ancaman udara di Laut China Selatan meliputi kesiapan operasional dan tempur yang didukung oleh kesiapan pengembangan organisasi, latihan dan pergeseran kekuatan atau alutsista. Kesimpulan terdapat potensi ancaman dan kesiapan Kogabwilhan I membutuhkan dukungan sarana prasarana dan alutsista.

Kata kunci : Antisipasi Ancaman, Konflik Laut China Selatan, Kesiapan , Pertahanan Udara.

1. Pendahuluan

Konflik Laut China Selatan (LCS) telah berlangsung sejak lama. Sejarah awalnya adalah penetrasi yang dilakukan oleh Negara Republik Rakyat China atas klaim sepihak mereka terhadap kepemilikan mayoritas wilayah Laut China Selatan. Klaim ini bermula ketika tahun 1947 Negara China memproduksi peta Laut China Selatan dengan 9 garis putus-putus dan menyatakan bahwa wilayah yang masuk dalam lingkaran garis tersebut adalah wilayah teritorial Negara Republik Rakyat China dan Peta ini kemudian ditegaskan kembali pada saat Partai Komunis China berkuasa pada tahun 1953. Klaim ini atas dasar sejarah Tiongkok Kuno, mulai dari dinasti Han yang berkuasa pada abad 2 SM sampai dengan Dinasti Ming dan Dinasti Qing di abad 13 SM. Dalam peta konflik di wilayah Laut China Selatan sebenarnya dibagi atas dua. yakni pertama, wilayah kepulauan Paracel yang terdapat di bagian utara Laut China Selatan. Di dalam konflik ini melibatkan Republik Rakyat China, Taiwan, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini. Kedua, konflik yang melibatkan Tiongkok dengan 4 negara ASEAN yakni, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang memperebutkan kepulauan Spratly pada bagian selatan wilayah Laut China Selatan.

Beberapa tahun terakhir ini eskalasi konflik di Laut China Selatan mengalami peningkatan. Hal ini tentunya berpengaruh pada wilayah Indonesia yang berada atau berbatasan



langsung dengan Laut China Selatan. Wilayah yang paling dekat dengan Kawasan Laut China Selatan adalah Kawasan Laut Natuna Utara dan Kepulauan Natuna. Ancaman berupa pelanggaran wilayah pada Kawasan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang cukup signifikan salah satunya adalah kurang memadainya kondisi kekuatan pertahanan baik di udara maupun di laut.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Usaha pertahanan negara tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dinamika bentuk ancaman yang dihadapi. Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Dalam melaksanakan pertahanan negara diperlukan kesiapan tempur dan operasional yang memadai. *Operational readiness* adalah tingkat kesiapan operasi seorang individu secara psikologis dan memiliki kemauan untuk ditugaskan suatu pekerjaan. Dalam dunia militer kesiapan operasi (*operational readiness*) adalah kemampuan suatu unit / formasi, kapal, sistem senjata, atau peralatan untuk melakukan misi atau fungsi yang itu terorganisasi atau dirancang. Dapat digunakan dalam pengertian umum atau untuk mengekspresikan tingkat



atau derajat kesiapan. Kesiapan operasi (*operational readiness*) memiliki aspek kematangan dan kecerdasan. Kesiapan tempur adalah kondisi angkatan bersenjata dan unit serta formasi penyusunnya, kapal perang, pesawat terbang, sistem senjata atau teknologi dan peralatan militer lainnya untuk dilakukan selama operasi militer tempur, atau fungsi yang konsisten dengan tujuan di mana mereka diorganisir atau dirancang, atau mengelola sumber daya dan pelatihan personil dalam persiapan untuk pertempuran. Menurut Gal (1986) kesiapan tempur adalah atribut psikologis dalam hal pilihan prajurit atau tingkat komitmen dan kegigihan dalam mempengaruhi tindakan tertentu. Dalam hal ini komitmen prajurit dalam menjalankan tugas yang diberikan sangatlah dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan psikologis Menurut Arikunto (2014), Kesiapan adalah suatu kompetensi sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat sesuatu.

2. Tinjauan Pustaka

Peranan menurut Poerwadarminta (2005) adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam hal ini, kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Peranan merupakan perangkat dari harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang tentunya memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap



bangsa. Menurut seorang ahli bernama Treats, ancaman adalah terjadinya situasi penting yang ada dalam sebuah perusahaan maupun yang lainnya di mana di dalamnya sedang tidak menguntungkan. Tujuan dari ancaman ini adalah untuk mengubah tatanan suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Hal inilah yang menyebabkan dibutuhkan adanya persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai ancaman yang terjadi. (Perwita, 2013)

Sebuah ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara di isu-isu keamanan global. Isu global, seperti penguatan nilai-nilai demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup masih menjadi indikator yang mempengaruhi pola hubungan internasional, terutama hubungan antarnegara, baik dalam skala bilateral maupun yang lebih luas. Isu-isu tersebut bahkan sering pula dijadikan ukuran dalam membangun kerja sama pertahanan antarnegara. Implikasi perkembangan lingkungan global tersebut menghadirkan keberagaman permasalahan yang kompleks dan terakumulasi dalam kondisi ketidakpastian dengan derajat yang cukup tinggi. Di bidang pertahanan dan keamanan, kecenderungan perkembangan global mempengaruhi karakteristik ancaman dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif.

3. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana peranan peningkatan kekuatan pertahanan udara dalam mengatasi ancaman konflik Laut China Selatan maka untuk digunakan metode penelitian dengan model metode kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan



mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan berakhir dengan suatu “teori”. (Moleong, 2014).

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Kondisi Kekuatan Pertahanan Di Wilayah Kepulauan Natuna.

Kondisi kekuatan pertahanan di wilayah kepulauan Natuna adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Komposisi jajaran Organisasi STT Natuna yang sudah tergelar yaitu Batalyon Komposit, Lanal Ranai, Lanud RSA, RS Terintegrasi, Kompi Komposit Marinir, Skadron Udara 52, Denhanud 477 Kopasgat dan Satrad 212.
2. Untuk melaksanakan Operasi Udara satuan-satuan di Natuna mendapatkan dukungan dari satuan tempur terdekat yaitu Skadron Udara 1, Skadron Udara 12 dan Skadron Udara 16.
3. TNI AU secara rutin melaksanakan Operasi Patroli Udara di atas wilayah Laut Natuna dengan mengerahkan kekuatan udara dari Pekanbaru maupun Pontianak.

Ancaman Konflik Laut China Selatan

Beberapa bentuk ancaman dari konflik Laut China Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan pangkalan militer yang berada di Kawasan sengketa Laut China Selatan tepatnya pada sebuah pulau buatan yang berada di Cuarteron Reef, Kepulauan Spratly.
2. Rutinnya pelaksanaan latihan bersama Angkatan Bersenjata China yang terdiri dari kapal induk dan beberapa pesawat tempur serta berbagai kapal perang.



3. Infiltrasi yang dilakukan berupa pelanggaran-pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh nelayan yang mendapat pengawasan penjaga pantai (coast guard) Republik Rakyat China.
4. Pelanggaran wilayah udara (penerbangan tanpa perijinan/Flight Clearance) di wilayah kedaulatan NKRI baik yang dilakukan oleh penerbangan militer suatu negara ataupun penerbangan sipil yang melintasi wilayah udara Nasional di atas Kepulauan Natuna atau memiliki kepentingan di wilayah Laut China Selatan.
5. Selama tahun 2021 telah terjadi 10 kali pelanggaran Wilayah Udara di wilayah udara sekitar Kalbar dengan rincian 4 kali pelanggaran di sepanjang ALKI 1 (2 terkonfirmasi oleh pesawat militer asing) dan 6 kali atas Wilayah Udara Natuna yang saat itu masih dikontrol oleh ATC (*Air Traffic Controller*) Singapura. Kejadian terakhir yaitu pada tanggal 13 Mei 2022 dimana terjadi pemaksaan mendarat di Lanud Hang Nadim Batam, pesawat sipil Malaysia dengan registrasi G-DVOR tipe DA62 dari Kuching dengan tujuan ke Senai, Malaysia. Pesawat tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti *Diplomatic Clearance* (DC), *Flight Clearance* (FC) dan *Flight Approval* (FA) selain *Flight Plan standard*.

5. Pembahasan

Konflik Laut China Selatan memberikan dampak ancaman pada wilayah FIR Jakarta dan ALKI I. Potensi ancaman dapat terlihat dari besarnya jumlah pelanggaran yang terjadi. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi TNI untuk mempertahankan wilayah NKRI. Potensi ancaman semakin meningkat sebagai imbas dari kondisi konflik keamanan global maupun regional. Konflik keamanan global yang mempengaruhi adalah Perang Rusia dan Ukraina sedangkan untuk konflik keamanan regional adalah eskalasi Konflik antara negara Republik Rakyat Tiongkok dengan negara-negara Kawasan Asia Tenggara mengenai Laut China Selatan.

Potensi ancaman yang terjadi di Laut China Selatan. Potensi tersebut meliputi pembangunan pangkalan militer yang berada di Kawasan sengketa Laut China Selatan tepatnya pada



sebuah pulau buatan yang berada di Cuarteron Reef, Kepulauan Spratly. Rutinnya pelaksanaan latihan bersama Angkatan Bersenjata China yang terdiri dari kapal induk dan beberapa pesawat tempur serta berbagai kapal perang. Infiltrasi yang dilakukan berupa pelanggaran-pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh nelayan yang mendapat pengawasan penjaga pantai (coast guard) Republik Rakyat China. Ancaman-ancaman ini berada pada zona abu-abu yakni ancaman non-militer tetapi menggunakan instrumen kekuatan yang setara dengan militer.

Prediksi skenario ancaman yang paling berbahaya kedua adalah timbulnya dua hotspots dari dua arah axis, yaitu dari Utara dan Selatan secara bersamaan. Kondisi perkembangan lingkungan strategis saat ini dan dihadapkan pada kenyataan tentang pembangunan kekuatan pertahanan negara-negara di sekitar kita, maka dapat diperkirakan:

1. Sumber ancaman dari Utara akan datang dari arah perairan Natuna dan sekitar Tanjung Datu Kalimantan Barat atau di Laut Sulawesi sekitar perairan Blok Ambalat. Keduanya akan dipicu oleh perebutan sumber daya alam, khususnya energi, dan akses untuk melintasi wilayah yurisdiksi nasional Indonesia.
2. Sumber ancaman dari Selatan akan datang dari arah wilayah sekitar perairan Timor sampai dengan wilayah Selatan Papua Barat. Modus yang diperkirakan akan terjadi adalah merupakan pengulangan dari peristiwa lepasnya Provinsi Timor Timur, yang dimulai dari adanya kekuatan bersenjata yang didukung oleh kekuatan asing dan diakhiri dengan campur tangan militer asing secara langsung. Tujuan akhirnya adalah penguasaan sumber daya alam di wilayah perairan Aru dan daratan Papua.

Kondisi pertahanan udara saat ini dinilai masih sangat minim jika dibandingkan dengan potensi ancaman yang akan dihadapi kedepannya. Hal ini dinilai mempengaruhi kesiapan operasional dan tempur dari satuan-satuan yang berada di bawah komando Kogabwilhan I. Kesiapan operasional dan tempur satuan yang berada di wilayah Kogabwilhan I secara personel memiliki kesiapan dan kewaspadaan terhadap dinamika ancaman di wilayah



Pertahanan Udara Indonesia. Tetapi kesiapan personel saat ini tidak mendapat dukungan kesiapan sarana dan prasarana dan alutsista. Kesiapan dukungan alutsista memiliki peranan yang cukup penting dan bernilai strategis. Peningkatan kekuatan dalam menunjang pertahanan udara memiliki beberapa tujuan yaitu untuk menguasai wilayah udara dan mengoptimalkan *Air Surveillance* di Kawasan Laut Natuna Utara.

Adapun kaitan dengan peningkatan kekuatan udara dengan tujuan menguasai wilayah udara dan mengoptimalkan *Air Surveillance* di Kawasan Laut Natuna Utara adalah untuk mengamankan wilayah ALKI I. Pengaruh dari kekuatan pertahanan udara secara umum dapat mengamankan wilayah kedaulatan udara dari ancaman konflik Laut China Selatan dan dapat membendung dampak serta pengaruh dari konflik tersebut. Kekuatan udara juga dapat memberikan dukungan pada kekuatan maritim di Laut Natuna Utara. Kekuatan yang mampu menyamai kekuatan negara-negara yang sedang berkonflik di wilayah Laut China Selatan akan memberikan efek gentar selain itu juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah ALKI I dan FIR Jakarta dapat langsung dilakukan penindakan dan pencegahan. Pengaruh ini akan berdampak secara optimal jika ditunjang kesiapan dari satuan yang berada di wilayah Kogabwilhan I dalam mengatasi ancaman udara yang merupakan dampak dari konflik Laut China Selatan. Kesiapan satuan memiliki pengaruh dalam mengoptimalkan pelaksanaan operasi.

Mengingat wilayah Laut Natuna Utara merupakan daerah yang rawan dikarenakan berada dan terdampak konflik Laut China Selatan maka upaya pertahanan negara di Kawasan ini haruslah didukung dengan kesiapan operasional dan kesiapan tempur (Legionosuko, 2021). Kedua kesiapan ini haruslah terlebih dahulu didukung oleh kesiapan pengembangan organisasi, pelatihan, pergeseran kekuatan/alutsista. Beberapa kondisi saat ini struktur organisasi yang berada di bawah kewenangan Kogabwilhan I yang memiliki tanggung jawab di wilayah Laut Natuna Utara di antaranya STT sebagai organisasi baru belum memiliki Komandan Satuan meskipun strukturnya telah ada tetapi personelnnya belum ditugaskan. Hal ini berdampak kesiapan pengembangan organisasi. Oleh karena itu



permasalahan ini harus diatasi dengan penempatan personel yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang diperlukan sesuai kebutuhan organisasi.

Peningkatan kemampuan dan kompetensi personel dapat dilakukan dengan beberapa upaya di antaranya adalah melalui pelatihan. Kesiapan pelatihan yang memadai dan sesuai kebutuhan operasi akan secara langsung berdampak pada kesiapan operasional dan kesiapan tempur di Kawasan Laut Natuna Utara. Pelatihan juga bertujuan meregenerasi kemampuan personel agar terlaksana secara lancar. Kesiapan pelatihan haruslah didukung oleh sistem, personel instruktur dan sarana prasarana yang mampu mengoptimalkan proses pelaksanaan pelatihan. Dalam mendukung kesiapan pelatihan mengingat lokasi tidak hanya terpusat pada suatu daerah maka perlu kesiapan pergeseran kekuatan alutsista. Kesiapan ini haruslah terpelihara agar tetap dalam kondisi yang optimal mengingat jika suatu saat diperlukan secara darurat dan mendadak. Kesiapan pergeseran kekuatan personel alutsista ini dapat dilakukan dengan dukungan alutsista maupun sarana prasarana berupa pesawat angkut serta prasarana barak atau mess untuk penginapan dan fasilitas pendukung lainnya.

6. Kesimpulan, Implikasi dan Saran

Dari hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi ancaman yang terjadi baik berupa ancaman militer dan non-militer terhadap wilayah kedaulatan udara Negara Republik Indonesia cukup besar terdampak dari konflik Laut China Selatan. Ancaman kedepannya dapat berupa pelanggaran-pelanggaran pesawat yang melintas baik dalam kondisi damai maupun konflik bersenjata mengingat posisi geografis Indonesia yang sangat strategis serta adanya pembangunan pangkalan militer maupun infiltrasi di Kawasan yang mengalami peningkatan.
2. Kondisi kesiapan tempur dan operasional satuan yang berada di bawah Kogabwilhan I dari segi kemampuan personel dalam keadaan optimal tetapi hal ini tidak ditunjang oleh kesiapan dukungan sarana prasarana dan alutsista. Kedua kesiapan ini haruslah terlebih



dahulu didukung oleh kesiapan pengembangan organisasi, pelatihan, pergeseran kekuatan/alutsista. Perlu adanya dilakukan peningkatan kekuatan dari segi jumlah personel serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan alutsista sehingga sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Peran kesiapan satuan yang berada di bawah Kogabwilhan I adalah mengoptimalkan dukungan pertahanan udara secara umum serta dapat mengamankan wilayah kedaulatan udara dari ancaman konflik Laut China Selatan dan dapat membendung dampak serta pengaruh dari konflik tersebut.

Berikut saran dan implikasi terkait dengan peningkatan kesiapan Kogabwilhan I dalam mendukung pertahanan udara di Laut Natuna Utara

1. Kementerian Pertahanan, DPR dan Mabes TNI dapat melakukan evaluasi terkait dengan peningkatan kemampuan personel dan jumlah serta peremajaan alutsista sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan potensi ancaman yang akan terjadi di masa depan.
2. Mabes TNI perlu melakukan evaluasi terkait dengan struktur organisasi terhadap STT Natuna sehingga misi dan operasi dapat terlaksana secara optimal.
3. Satuan-Satuan TNI AU dapat melakukan pembinaan secara rutin terhadap kemampuan saat ini untuk meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi eskalasi ancaman yang dapat menjadi konflik bersenjata di Laut China Selatan.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.



Gal, Reuven. (1986). *Unit Morale: From a Theoretical Puzzle to an Empirical Illustration-An Israeli Example*. *Journal of Applied Social Psychology* retrieved from https://www.researchgate.net/publication/247678165_Unit_Morale_From_a_Theoretical_Puzzle_to_an_Empirical_Illustration-An_Israeli_Example1

Legionosuko, T., Pedrason, R., Sumarlan, S., Sudiby, & Halkis, M. (2021). *Reorientation of Indonesian Defense Diplomacy for Security Stability in the South China Sea*. *Political Science and Security Studies Journal*, 2(4), 3-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5764901>

Moleong, J.Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Poerwadarminta. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*. Balai Pustaka: Jakarta

Perwita, A.A.B. (2013). *Dimensi Ancaman Keamanan dan Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.